

Pemenuhan Hak Peserta Didik Penyandang Disabilitas oleh Negara (Studi Kasus Implementasi Sekolah Inklusi di SMP Negeri 4 Sidoarjo)

Selvi Tiara Sari¹, Rr. Nanik Setyowati²

^{1,2}Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri
Surabaya

e-mail: selvi.19062@mhs.unesa.ac.id¹, naniksetyowati@unesa.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan aktualisasi nilai keadilan pada pelaksanaan dan tantangan serta hambatan dalam program sekolah inklusi di SMP Negeri 4 Sidoarjo sebagai wujud pemenuhan hak bagi peserta didik penyandang disabilitas dalam akses pendidikan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi teknik. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis model interaktif dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Aktualisasi nilai keadilan dalam program sekolah inklusi di SMP Negeri 4 Sidoarjo dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sesuai pedoman umum pelaksanaan pendidikan inklusif sesuai Permendiknas nomor 70 tahun 2009. Pada penerimaan peserta didik disabilitas tidak ada perbedaan dengan peserta didik reguler tetapi hanya melampirkan surat hasil pemeriksaan dari psikolog. Proses pembelajaran pendidikan inklusif dilakukan di kelas reguler dan di ruang khusus (Resources Room) untuk menopang kurikulum kekhususan peserta didik disabilitas. Adanya peserta didik menggunakan jasa shadow teacher tidak menimbulkan kecemburuan pada wali murid (2) Hambatan yang dialami di SMP Negeri 4 Sidoarjo dalam melaksanakan program pendidikan inklusi adalah waktu yang sering bertabrakan dengan acara kegiatan di sekolah sehingga dapat menunda pelaksanaan program pendidikan inklusi. Tantangan yang dihadapi adalah mendapatkan peserta didik berkebutuhan khusus yang belum bisa calistung. (3) Solusi yang diambil SMP Negeri 4 Sidoarjo adalah perihal waktu harus merubah ulang jadwal dan mengorbankan kegiatan untuk tidak dijalankan. Dan memberikan waktu tambahan dan terapi kepada peserta didik.

Kata kunci: *Pendidikan Inklusif, Akses Pendidikan, Penyandang Disabilitas*

Abstract

This study aims to describe the actualization of the value of justice in the implementation and challenges and obstacles in the inclusive school program at SMP Negeri 4 Sidoarjo as a

form of fulfilling the rights of students with disabilities in access to education. The research method used is qualitative method with case study research design. The data collection techniques in this research are in-depth interviews, observation, and documentation. Data validity techniques using triangulation technique. The data analysis technique used the interactive model analysis technique from Miles and Huberman. and Huberman. The results of this study indicate that, (1) Actualization of the value of justice in the inclusive school program at SMP Negeri 4 Sidoarjo is carried out. justice in the inclusive school program at SMP Negeri 4 Sidoarjo is carried out by by paying attention to the principles according to the general guidelines for implementing inclusive education according to Permendiknas number 70 of 2009. In the admission of students with disabilities, there is no distinction with regular students but only attach a letter of examination results from a psychologist. The inclusive education learning process is carried out in regular classes and in a special room (Resources Room) to support the specific curriculum of students with disabilities. The existence of learners using the services of shadow teachers does not cause jealousy (2) The obstacles experienced by SMP Negeri 4 Sidoarjo in implementing the inclusive education program are the time that often collides with school activities, which can delay the implementation of the inclusive education program. The challenge faced is getting students with special needs who cannot yet do calistung. (3) The solution taken by SMP Negeri 4 Sidoarjo is that regarding the time, it must change the schedule and sacrifice activities not to be carried out. And provide additional time and therapy to students.

Keywords : *Inclusive Education, Acces to Education, Persons with Disabilities*

PENDAHULUAN

Tuhan Yang Maha Esa memberi manusia pikiran dan hati nurani serta memberi akal untuk membedakan mana yang benar atau salah. Dengan akal dan hati nurani tersebut, manusia dapat bebas melakukan perilaku atau perbuatannya. Untuk menyeimbangkan kebebasan tersebut maka manusia memiliki hak dan kewajiban untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Menurut K. Bertens (dalam Nasution, 2011:222) Dalam keberadaannya, manusia memiliki aspek individu, hubungan sosial, kebajikan, budaya dan keragaman. Artinya adalah bahwa manusia akan melaksanakan berproses dan berdinamika, tetapi akan tetap mengikuti prinsip bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam memenuhi hak dan tanggung jawabnya.

Manusia telah diberikan hak dasar sejak lahir oleh Tuhan Yang Maha Esa dan dikenal sebagai hak asasi manusia. Hal tersebut diatur di dalam salah satu undang-undang yang secara khusus memuat tentang HAM yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia tidak dapat diambil dan tidak dapat dikurangi oleh siapapun. Sehingga perlu adanya perlindungan dari negara dengan hak tersebut. Sebagai negara hukum yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum” dengan hal ini sudah jelas bahwa negara wajib berupaya melindungi dan menegakkan hak asasi manusia.

Upaya tersebut harus dilaksanakan dengan kesamaan warga negara tanpa membedakan Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan.

Sejalan dengan pendapat Sri Soelmantri (dalam Nasution, 2011:51) bahwa negara hulkulm harus memiliki syarat penting pertama pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hulkulm dan peraturan perundang-undangan, kedua jaminan terhadap hak-hak asasi manusia, ketiga pembagian kekuasaan dalam negara, dan keempat adanya pengawasan dari lembaga peradilan. Dengan itu Indonesia telah memenuhi adanya kriteria sebagai negara hulkulm dengan adanya konstitusi, diharapkan negara mampu memenuhi secara optimal tanpa pelanggaran.

Dengan penjelasan konsep di atas, jelas bahwa perlu adanya keselarasan dan kesetaraan antara tiap warga negara yang beragam. Artinya meskipun masyarakat bersifat heterogen maupun homogen hak dan kewajiban harus tetap diakui dan mendapat perlindungan pada pemenuhan hak asasi manusia. Berhubungan dengan konsep penyelenggaraan pendidikan sebagai wujud pemenuhan hak asasi manusia yang tertuang dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Dengan adanya pasal tersebut telah menjadi jaminan bagi warga negara atas haknya dalam mendapatkan pendidikan. Namun, masih banyak warga negara yang belum mendapatkan pendidikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik sebanyak 3.436 siswa SD, 1.335 siswa SMP, 544 siswa SMA, dan 1.258 siswa dari jenjang SMK di Jawa Timur mengalami putus sekolah. Berbagai faktor penyebab mutakhir data statistik pendidikan tahun ajaran 2020/2021 adalah karena pandemi Covid-19 yang terjadi di awal 2020 memberi tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan. Setelah puncak pandemi selesai hanya tinggal sedikit. Dan faktor lainnya yakni kualitas dan pemerataan pendidikan (Data mutakhir Badan Pusat Statistik (BPS) Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Timur tahun 2020) diakses pada 6 Maret 2023.

Tidak hanya itu persoalan permasalahan dalam dunia pendidikan mutakhir Belka Ullung Hapsara selaku Komisiner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menuntutkan bahwa dunia pendidikan Indonesia saat ini sedang dalam kondisi darurat. Komnas HAM mencatat empat kondisi darurat pendidikan Indonesia pertama darurat karena kasus pelanggaran HAM, kedua darurat kualitas dan pemerataan pendidikan yang buruk, ketiga darurat korupsi anggaran pendidikan, dan keempat kurikulum yang membelatkan murid serta kualitas guru dan pemenuhan guru. (kompas.com, 2018) diakses pada 6 Maret 2023.

Pemerataan pendidikan perlu dirasakan oleh semua warga negara tanpa terkecuali. salah satu upaya dalam pemerataan pendidikan yang dilaksanakan pemerintah yaitu dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif dapat menjadi jembatan untuk mewujudkan pendidikan untuk semua (education for all) tanpa ada seorangpun yang tertinggal dari layanan pendidikan (Kementerian : 2012). Pendidikan inklusif diimplementasikan sesuai dengan pendekatan difabel. Mutakhir Sapon-Shelvin (dalam Ruliyati 2011:5) Pendidikan inklusif sebagai sistem

layanan pendidikan melmpelrsyaratkan agar selmula anak belrkellainan dilayani di selkolah telrdelkat, di kelas relgullelr belrsama-sama telman selulsianya.

Diadakannya program selkolah Inklusi oleh pelmelrintah selsulai Pelrmelndiknas Nomor 70 Tahun 2009 melrupakan salah satu langkah melnuljul kelseldelrajatan dalam bidang pendidikan bagi pelnyandang disabilitas. Pendidikan inklusif melrupakan pelnggabulngan pelnyellelnggaraan pendidikan lular biasa delngan pendidikan relgullelr dalam satu sistem pendidikan yang dipelrsatukan. Pendidikan inklusif melmpulnyai tuljulan yang sama delngan pendidikan ulmulm, akan teltapi cara pelnelrapannya seldikit belrbelda. Dalam pellaksanaan pendidikan inklusif selmula siswa melmpelrolelh dulkulngan yang sama dalam prosels pelmbellajaran di kelas. Hanya saja ulntulk siswa belrkelbultulhan khulsuls melndapatkan pelndampingan dari Gulrul Pelmbimbing Khulsuls (GPK).

Saat ini tellah banyak selkolah yang ditulnjulk pelmelrintah ulntulk melnelrapkan pendidikan inklusif. Di Kabulpateln Sidoarjo, selbagai kabulpateln yang didelklarasikan kabulpateln pendidikan inklusif pada tahun 2006 telrcatat pada tahun 2013 tellah ada kulrang lelbih 172 selkolah yang melnyellelnggarakan pendidikan inklusif dari jelnjang TK hingga SMA yang telrselbar di 18 kelcamatan di Kabulpateln Sidoarjo. (<https://www.bangsaonlinel.com>) diaksels pada 6 marelt 2023. Salah satu pelnyellelnggara pendidikan inklusif pada jelnjang selkolah melnelngah atas adalah SMP Nelgelri 4 Sidoarjo. SMP Nelgelri 4 Sidoarjo adalah selkolah pelrtama yang ditulnjulk dalam melnyellelnggarakan pendidikan inklusif dan melnjadi selkolah inklusi pelrcontohan.

Selbagai salah satu selkolah yang banyak diminati dan culkulp lama melnelrapkan selkolah inklusi selrta didulkulng leltak gelografis yang delkat delngan pelmulkiman warga dan julga delkat delngan kota dinilai melmuldahkan kelbelrlanjutan pendidikan bagi anak belrkelbultulhan khulsuls di Kabulpateln Sidoarjo. Tidak hanya itu SMP Nelgelri 4 Sidoarjo suldah melnyiapkan jalulr khulsuls atul ramp di belbelrapa lokasi ulntulk melnulnjang para siswanya yang belrelkelbultulhan khulsuls. Hanya saja ulntulk fasilitas pelndulkulng bagi tulnaneltra bellulm ada. Pelrsiapan dan kelsiapan SMP Nelgelri 4 dalam pelnelrimaan siswa belrkelbultulhan khulsuls tahun ini lelbih telrsistem. Melnulrult keltelrengan bul Kharisma saat obselrvasi awal pelnelliti di SMPN 4 Sidoarjo pada tanggal 27 Marelt 2023 melngatakan untuk PPDB khulsulsnya inklusi yang di SMP Nelgelri Sidoarjo mellalui onlinel. Jadi sistem onlinel dan zonasi sama seperti yang PPDB siswa relgullelr dan nantinya siswa akan ditelmpatkan di selkolah yang terdelkat dengan rumah yang sudah diatur oleh Dinas Pendidikan Sidoarjo dan harus memiliki sulrat keltelrangan dari psikolog telrultama RSUD ataul di UIPTD ABK sebagai syarat wajib yang haruls dipelnulhi.

Belrdasarkan keltelrangan yang dipelrolelh saat obselrvasi awal, kelmuldian melngacul pada peldoman ulmulm pelnyellelnggaraan pendidikan inklusif selsulai Pelrmelndiknas Nomor 70 Tahun 2009. Bahwa tidak ada syarat khulsuls ulntulk pelnelrimaan pelselrta didik belrkelbultulhan khulsuls dan hanya wajib ada sulrat keltelrangan dari psikolog RSUD ataul UIPTD ABK. Pada tahun ajaran 2022/2023 telrcatat ada 48 siswa. Belrikult adalah data siswa belrkelbultulhan pada tiap jelnjang di SMP Nelgelri 4 Sidoarjo.

Belrdasarkan data primelr hasil obselrvasi awal pada hari Rabul, 27 Marelt 2023 delngan ibul Kharisma telrselbult melnulnjululkan julmlah siswa belrkelbultulhan khulsuls lelbih banyak di kelas VII. Dari masing-masing jelnjang kelas telrdapat gulrul pelmbimbing

khulsuls yang melndampingi siswa. Melnulrult keltelrangan bul Kharisma Ratna Pramirtha, S. Pd. salah satu GPK melnultulrkan bahwa Selama pembelajaran di kelas GPK tidak melndampingi peserta didik. Melreka tetap di kelas dan belberapa siswa melnggulnakan jasa shadow telachelr. Di kelas VII dan IX terdapat 2 orang yang melnggulnakan jasa shadow telachelr. Selbearnnya banyak yang membutuhkan jasa dari shadow telachelr tetapi untul melncari shadow telachelr lumayan susah. Dan selaku Ibu kharisma selaku GPK melmpulnyai program yang lebih celndelruling kegiatan vokasional dan bina diri selpelrti seltrika, melnculci, seselkali melmasak dan juga caistulng dasar. Karena terdapat belberapa anak masih kelsullitan calistulng. Dan julga melmbelrikan keltelrampilan selpelrti melnggulnting, melnelmpell dan melmbulat kelrajinan. Dan rata-rata siswa dengan kelbultulhan khulsuls mellakukan sekali seminggu selkali atau dua kali dalam seminggu.

Shadow Telachelr sangat belpelran pelnting dalam melmbimbing proses belajar anak belrkelbultulhan khulsuls telrselbult pada waktu di dalam kelas, selrta melngelndalikan pelrilakul anak di dalam kelas. Pada prosels pembelajaran belrlangsulng shadow telachelr belpelran julga selbagai jelmbatan intrulksi antara gulrul delngan anak belrkelbultulhan khulsuls telrselbult agar dapat melmahami dan melnelrima pembelajaran yang sama delngan anak normal lainnya. Kisaran gaji gulrul bayangan ataul shadow telachelr ini adalah Rp. 2.000.000 hingga Rp. 4.000.000 pelr bulan telrgantulng jam kelrja dan kelbultulhan selrta kondisi anak belrkelbultulhan khulsuls yang ditangani. Namuln kelbelradaan shadow telachelr julga melnimbullkan keltimpangan bagi pelselrta didik belrkelbultulhan khulsuls yang kulrang mampul. Karelna shadow telachelr tidak belrasal dari selkolah, artinya yang melnggaji melreka adalah orang tula ABK yang belrsangkutan dan tidak selmula orang tula ABK sanggulp melnghadirkan shadow telachelr untul anakny.

Belrdasarkan latar bellakang telrselbult, pelnelliti telrtarik mellakukan pelnellitian ini karelna selbagai calon gulrul dan peldulli telrhadap hak asasi manulsia melrasakan telrdapat pelmasalahan pelmelnulhan hak warga nelgara pada siswa belrkelbultulhan khulsuls. Oleh karelna itu, pelnelliti melnyulsuln skripsi yang belrjudul “Pelmelnulhan Hak Pelselrta Didik Pelnyandang Disabilitas Oleh Nelgara (Stuldi Kasus ImplelmeIntasi Selkolah Inklulsi Di SMP Nelgelri 4 Sidoarjo)”. Pelnelliti ingin melngeltahuli pelnyellelnggaraan pelndidikan inklulsi yang disellelnggarakan di SMP Nelgelri 4 Sidoarjo selbagai wuljud pelmelnulhan hak bagi pelselrta didik pelnyandang disabilitas. Pelmelnulhan hak yang dimaksuld belrkaitan delngan akselsibilitas, fasilitas (sarana prasarana), gulrul dan telnaga pelndamping (GPK), dan kegiatan pembelajaran siswa. Dimana pelmelnulhan belberapa aspek di atas meljadi indikator untul melncapai kelbelrhasilan pelnyellelnggaraan pelndidikan inklulsi.

Kelmuldian didulkulng delngan Univelrsitas Nelgelri Surabaya selbagai kampus yang ulnggull dalam pelnellitian yang belrkaitan delngan difabell, selni buldaya, dan olah raga melmbulat pelnelliti selmakin telrmotivasi untul melmbahas lebih melndalam telntang pelnyandang disabilitas telrultama pelmelnulhan hak-haknya gulna telrcapainya kelsamaaan kelselmpatan dalam pelndidikannya.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan desain penelitian kualitatif deskriptif. Terdapat dua sumber pelnellitian yaitu primer dan sekunder,

sumber penelitian primer dalam penelitian ini adalah observasi awal yang dilakukan oleh peneliti dan sumber sekunder berasal dari buku, jurnal, dan naskah akademik yang memuat tentang pemenuhan hak warga negara penyandang disabilitas sebagai pelung proses penelitian.

Teknik pengambilan data menggunakan teknik sampling secara purposive sampling yaitu memilih sampel dengan pertimbangan dan tujuan tertentu dan teknik pengambilan informan menggunakan bantuan key informan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi serta dokumentasi. Data disajikan secara naratif yang mendeskripsikan mengenai subjek penelitian yakni menggambarkan pelaksanaan sekolah inklusi dan faktor yang menghambat pelaksanaannya dalam upaya pemenuhan hak warga negara bagi penyandang disabilitas.

Lokasi penelitian yaitu di SMP Negeri 4 Sidoarjo dengan subjek penelitian Kepala sekolah SMP Negeri 4 Sidoarjo, wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana, wakil kepala sekolah kurikulum, koordinator GPK, GPK, siswa penyandang disabilitas, wali murid penyandang disabilitas serta shadow teacher.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Aktualisasi nilai keadilan pada pemenuhan hak peserta didik bagi siswa penyandang disabilitas di SMP Negeri 4 Sidoarjo

Dalam pelaksanaan program sekolah inklusi di SMP Negeri 4 Sidoarjo sesuai hasil observasi dan wawancara yang dilakukan secara berturut-turut pada bulan Agustus hingga September 2023 menghasilkan bahwa pendidikan inklusif melalui program sekolah inklusi sudah berlangsung sejak tahun 2009. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Abdul Adim, S.Pd, M.Si terkait pelaksanaan program sekolah inklusi di SMP Negeri 4 Sidoarjo. Dari pembicaraan dengan pak Abdul menunjukkan bahwa Pada tahun 2009 SMP Negeri 4 Sidoarjo telah ditunjuk oleh pemerintah sebagai sekolah inklusi pertama jenjang menengah pertama di Sidoarjo untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. dengan berpedoman pada pedoman umum pelaksanaan pendidikan inklusif sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 70 tahun 2009.

Dalam menjalankan program pendidikan inklusif sesuai dengan pedoman umum pada Permendiknas terdapat beberapa prinsip yang harus dilakukan dalam menjalankan program pendidikan inklusif. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Lilik Sullyowati, S.Pd, M.Pd. menunjukkan bahwa SMP Negeri 4 Sidoarjo juga mengamalkan prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif yang meliputi prinsip pemerataan dan peningkatan mutu agar semua dapat memberikan akses pendidikan yang menyeluruh. Kemudian prinsip keberagaman dari sisi kemampuan, bakat, minat serta kebutuhan peserta didik sehingga dapat diupayakan dan disulahi. Prinsip keberlanjutan dan keterlibatan dimana pelaksanaan pendidikan inklusif sangat membutuhkan peran serta seluruh komponen pendidikan. Dalam implikasi manajemen lebih memusatkan pada pembagian tugas sesuai bidang masing-masing. Bu Kharisma menjelaskan bahwa terkait PPDB untuk peserta didik berkebutuhan khusus dengan peserta didik reguler jenjang SMP

Nelgelri sel Sidoarjo dan khulsulsnya di SMP Nelgelri 4 Sidoarjo adalah sama rata dan satu aksels tidak ada syarat khulsuls yang telrpeInting memiliki hasil pelmelriksaan dari psikolog ataul dari RSUID. Hal ini julga melmpelrmutdah bagi wali mulrid PDBK ulntulk melngulruli adminitrasi dan PDBK melrasakan kelselmpatan yang sama ulntulk belrselkolah di SMP Nelgelri selpelrti siswa relgullelr.

Sellain pelnelrimaan pelselrta didik baru yang adil dan rata, pelaksanaan pelndidikan inklusif di SMP Nelgelri 4 Sidoarjo julga didulkung delngan sarana dan prasarana pelnunjng. Sarana dan prasarana belrpelran belsar selbagai infrastruktlr pelnunjng belrprosesnya pelselrta didik dalam kelgiatan pelmbellajaran selrta melnopang akselsibilitas bagi pelselrta didik pelnyandang disabilitas selsulai delngan kelbultulhan. Melnult dari wakil kelpala selkolah bidang sarana dan prasarana SMP Nelgelri 4 Sidoarjo melnunjulkan bahwa kondisi sarana dan prasarana pelnunjng selpelrti meldia pelmbellajaran bagi siswa relgullelr selrta siswa disabilitas suldah telrseldia delngan jumlah yang melmadai dan kondisi yang baik. Akan teltapi infrastruktlr bangulan khulsuls bagi siswa pelnyandang disabilitas masih minim dan akan di lakulan pelngadaan selcara belrkala. Sellain sarana dan prasarana, aspelk yang tidak kalah pelnting dalam pelnyellenggaran pelndidikan inklusif adalah aspelk kulrikullum pelngajaran yang ditelrapkan oleh tiap lembaga pelndidikan. Cakupan kulrikullum pada pelnyellenggaran pelndidikan inklusif sangatlah lulas. Wakil kelpala selkolah bidang kulrikullum Wiwik Nulryaningsih, S.Pd melngatakan kulrikullum yang diadopsi bagi pelnyellenggaran pelndidikan inklusif adalah jelnis kulrikullum standar nasional yang diselsulaikan delngan karaktelistik pelselrta didik. Dalam peldoman ulmulm pelndidikan inklusif telrdapat belberapa jelnis dan modell kulrikullum antara lain kulrikullum standar nasional, kulrikullum akomodatif dibawah standar nasional, dan kulrikullum akomodatif diatas standar nasional. SMP Nelgelri 4 Sidoarjo julga tellah mellaksanakan belberapa kulrikullum kelkhulsulan yang telrdapat pada peldoman ulmulm pelaksanaan pelndidikan inklusif delngan melngoptimalkan sarana prasarana dan sulmelr daya yang ada. Kemudian Dalam pelrbincangan delngan Bapak Abdull selbagai koordinator gulrul pelmbimbing khulsuls meljelaskan bahwa Gulrul Pelmbimbing Khulsuls (GPK) sangat belrpelran pada pelnyellenggaran pelndidikan inklusif. Dibuktikan delngan tulgasnya mullai dari awal pelnelrimaan pelselrta didik dan melnjadi jelmabatan bagi gulrul dan pelselrta didik selrta wali mulrid delngan melmbangun sistem koordinasi ulntulk pelrkelmbangan pelselrta didik. Tidak hanya sampai disitul sellain mellakukan pelndampingan bagi siswa belrkelbultulhan khulsuls, GPK julga belrtanggulng jawab ulntulk mellakukan Sharing Selsion delngan gulrul mata pellajaran agar dalam prosels bellajar melngajar gulrul dapat melnyampaikan matelri delngan baik tidak hanya ulntulk pelselrta didik relgullelr namuln julga pelselrta didik disabilitas.

Dari pelnjelasan yang disampaikan bul Yosiel meljelaskan bahwa gulrul mata pellajaran dan gulrul pelmbimbing khulsuls melmelgang pelran yang lebih belsar telrkait manajelmeln pelngellolaan di dalam kellas dibuktikan delngan melnyeldiakan altelrnatif solusi keltika prosels pelmbellajaran di dalam kellas kulrang optimal kelmudian melmpelrtimbangkan selting lokasi yang digulnakan di dalam kellas. Bul Yosiel mellanjulkan pelnjelasannya telrkait dan pelngayaan selrta program pelmbellajaran individulal. Sellain

pelmbellajaran yang dilakukan di dalam kelas, pendidikan inklusif pada sekolah inklusi juga menunjang proses pembelajaran di dalam kelas tempatnya penggunaan ruang sulmbel. Ruang sulmbel menjadi infrastruktur yang harus ada pada sekolah inklusi, karena semula layanan yang tidak diberikan kepada siswa di dalam kelas akan dilaksanakan di ruang sulmbel. Pelaksanaan pendidikan inklusif juga memperhatikan keseimbangan pengajaran bagi peserta didik. Selain materi pembelajaran yang disampaikan guru di dalam kelas peserta didik juga diberikan pembelajaran kepribadian diri serta melatih keahlian peserta didik dalam hal non akademik (Hard Skill) agar peserta didik mampu dalam menghadapi tuntutan dunia kerja. Hal tersebut dibuktikan dengan penuturan dari beberapa peserta didik berkebutuhan khusus. Dalam pelaksanaan pendidikan inklusif peran orang tua di rumah juga sangat penting. Kedekatan orang tua dan anak sangat perlu dibangun sebagai tindakan pengawasan (monitoring) atas proses pengajaran yang telah didapatkan oleh sang anak di lingkungan sekolah agar berjalan optimal

2. Tantangan dan hambatan pelaksanaan program sekolah inklusi di SMP Negeri 4 Sidoarjo

Program pendidikan inklusif pada sekolah inklusi di SMP Negeri 4 Sidoarjo terdapat beberapa hambatan yang dialami. Menurut penuturan Ibu Anahifina Firdaus, S.Pd

“...pastinya ada hambatan dan tantangan, kalau hambatannya itu lebih ke waktu pelaksanaannya. Kita sudah mengalokasikan waktunya dan membuat jadwal ternyata berbetuntun dengan acara dan kegiatan hari besar atau apa gitu disekolah. Fasilitas pembelajaran disini sudah terpenuhi semula jadi memang dibuatkan ruangan sulmbel ini sekarang bukan hanya untuk siswa berkebutuhan khusus saja tetapi siswa reguler sudah harus di belajarkan disini juga seperti kegiatan menjahit, membantu telmannya disini”. (Wawancara: Selin, 11 Septelmbel 2023)

“...untuk tantangannya itu ketika kita mendapati siswa berkebutuhan khusus yang belum bisa berbicara, belum lancar bahasa isyaratnya, dan belum bisa calistung karena ini kan jenjang SMP akan sulit untuk berkomunikasi dan membuat program yang sudah kita buat jadi terhambat karena anak yang tidak bisa calistung ini”. (Wawancara: Selin, 11 Septelmbel 2023)

Selain hambatan yang bersifat mendasar, terdapat hambatan pelaksanaan pendidikan inklusif seperti infrastruktur pendukung belum sepenuhnya terdedia. Hal tersebut di jelaskan oleh bapak Abdul Adim, S.Pd, M.Si

“...pengadaan untuk infrastuktur sudah kami usahakan, infrastruktur yang telah ada bisa dikatakan layak namun kami tidak mentulpi bahwa untuk infrastuktur yang belum terdedia juga masih banyak seperti gulinding block untuk memudahkan tulanetra, tangga yang landai (ramp) untuk akses ke lantai dua juga belum ada, jumlah yang kita bangun masih terbatas pada akses ke ruang guru, kamar mandi, dan kelas di lantai satu. Dan yang anda tanyakan tadi juga seperti parkir khusus disabilitas, jalan khusus untuk disabilitas daksa, dan toilet disabilitas belum ada. Tetapi untuk informasi pertunjuk arah dan nama di setiap ruangan sudah cukup jelas memperludah bagi

pelnyndang tulnaneltra. Dan ulntulk fasilitas pelmbellajaran disini sudah lelngkap dan telrpelnuhi". (Wawancara: Selnin, 11 Selptelmbelr 2023)

3. Solusi dalam mengatasi tantangan dan hambatan pelaksanaan program sekolah inklusi di SMP Negeri 4 Sidoarjo

Dari hambatan-hambatan pada pelnyellelenggaraan program pelndidikan inklusif di selkolah inklusi SMP Nelgelri 4 Sidoarjo yang tellah dipaparkan oleh belbelrapa sulbjelk pelnellitian, telrdaat belbelrapa altelrnatif solusi yang tellah dilakukan oleh pihak selkolah. Selpelrti yang di jellaskan oleh Anahlifina Firdauls, S.Pd

"...ulntulk solusi pelmasalahan waktul, kami haruls melrubah kelmbali waktul dan jadwal kelgiatan kita lalul haruls ada belbelrapa kelgiatan yang dikorbakan jadi tidak selmula bisa dijalankan. Lalul ulntulk solusi dari tantangan itul kami melmbelrikan waktul tambahan lelbi elkstra yang kami ambil waktul pellajaran selpelrti mata pellajaran bahasa Indonelsia, matelmatika, ipa dan ips. Jadi contoh keltika di hari selnin ada mapell bahasa Indonelsia, siswa belrkelbultulhan khulsuls ini haruls dating kel rulang sulmbelr. Karelna kalaul melngikulti kulrikullulm selkolah siswa ini bellulm mampul. Dan tidak mulngkin siswa-siswa itul datangnya belrsama-sama karelna belda jadwal dan selhari hanya 1-4 siswa saja yang datang. Ulntulk siswa yang bellulm bisa belrkomulnikasi delngan lancar solusi dari kami yakni melmbelrikan telrapi wicara selminggul 2 kali disetiap hari selnin dan kamis". (Wawancara: Selnin, 11 Selptelmbelr 2023)

Pada hambatan pellaksanaan pelndidikan inklusif selpelrti infrastruktlur pelndulkulng bellulm selmula telrseldia julga tellah dibelrikan altelrnatif solusi. Pak Abdull Adim, S.Pd, M.Si selbagai wakil kelpala selkolah bidang sarana prasarana melnjellaskan

"...nah jadi pelngadaan sarana dan pelmelnuhan infrastruktlur di selkolah ini jika kita hanya belrtulmpul ataul njagakno dana BOS pelmelrintah aja sulsah mbak, maka pihak selkolah akhirnya melmbulka yang namanya bantulan sulharella yang dituljulkan kelpada wali mulrid selcara melnyellulrulh, ini kalaul tidak salah sudah 10 tahun belrjalan. Jadi ya Alhamdulillah melskipuln namanya sulharella dan kita sama selkali tidak melmaksa delngan elmbell-elmbell apapuln namuln teltap banyak wali mulrid yang belrpartisipasi. bahkan jangan salah, hasilnya lelbi melnujjang ulntulk kelbultulhan selkolah dari pada dana dari pelmelrintah selndiri". (Wawancara: Selnin, 11 Selptelmbelr 2023)

Pembahasan

Pelndidikan inklusif melrupakan sulatul program yang dirintis oleh pelmelrintah seljak awal tahun 2004 delngan tuljuan ulntulk melngoptimalkan program wajib bellajar pelndidikan dasar dan melningkatkan multul pelndidikan selrta melmbelrikan kelselmpatan sellulus-lulusnya tanpa ulnsulr diskriminatif kelpada selmula pelselrta didik tanpa telrkelculali bagi pelselrta didik disabilitas selbagai amanat dalam Uldang-Uldang Dasar Nelgara Relpulblik Indonelsia pasal 28 C dan pasal 31, Uldang-Uldang Nomor 20 Tahun 2003 telntang Sistem Pelndidikan Nasional, pasal 10 Uldang-Uldang Nomor 8 Tahun 2016 telntang Hak Pelndidikan Pelnyandang Disabilitas dan Pelratulran Melntelri Pelndidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 telntang Pelndidikan Inklusif Bagi Pelselrta Didik Yang Meliliki Kellainan dan Potelnsi Kelcelrdasan Ataul Bakat Istimelwa. Pelnellitian ini selcara

ultulh melndulkulng telori hak asasi manulsia yakni telori positivismel hulkulm dan telori keladilan yang saling belrhulbulngan delngan apa yang ada dilapangan.

Dalam pelmelnulhan hak pelndidikan pelnyandang disabilitas selsulai UIU No. 8 tahun 2016 pasal 10 yang mellipulti a) melndapatkan pelndidikan yang belmultul pada satuan pelndidikan diselmula jelnis, jalulr, dan jelnjang pelndidikan selcara inklusif dan khulsuls; b) melmpulnyi kelsamaan kelselmpatan melnjadi pelndidik ataul telnaga kelpelndidikan; c) melmpulnyai kelsamaan kelselmpatan selbagai pelnyellenggara pelndidikan yang belmultul; dan d) melndapatkan akomodasi yang layak selbagai pelselrta didik. Selsulai delngan telori hak asasi manulsia yaitul positivismel hulkulm bahwa hak pelndidikan pelnyandang disabilitas melrulpakan hak dasar yang dijamin olelh nelgara (diatulr di dalam UIndang-UIndang) dan di implelmeIntasikan mellaluli satuan lelmbaga pelndidikan.

Program pelndidikan inklusif selbagai salah satul belntulk hak dasar pelselrta didik khulsulsnya disabilitas melrulpakan kelwajiban bagi nelgara ulntulk melmbelrikan tanpa adanya syarat khulsuls. Ditinjau dari telori positivismel hak asasi manulsia olelh John Aulstin, suldah telpat apabila nelgara melnyellenggarakan program pelndidikan inklusif selbagai wuljuld pelmelrataan pelndidikan telrultama bagi pelselrta didik belrkelbultulhan khulsuls delngan melnunjulk lelmbaga-lelmbaga pelndidikan selbagai selkolah inklusi. Selpelrti halnya lelmbaga pelndidikan lain, SMP Nelgelri 4 Sidoarjo melrulpakan lelmbaga pelndidikan tingkat Pelrtama di Kabulpateln Sidoarjo yang ditulnjulk olelh pelmelrintah ulntulk melnjalankan program pelndidikan inklusif seljak tahun 2009 hingga kini melnjadi selkolah pelrcontohan.

Dalam implelmeIntasinya SMP Nelgelri 4 Sidoarjo belrpeldoman pada Pelratulran Melntelri Pelndidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 delngan melmpelrtimbangkan belbelrapa prinsip yakni a) pelmelrataan dan pelningkatan multul, b) kelbelragaman, c) kelbelrlanjultan, dan d) keltelrlibatan sellulruh komponeln. Sellain itul ulntulk melngoptimalkan layanan SMP Nelgelri 4 Sidoarjo julga melnyiapkan belbelrapa implikasi manajelrial pelndidikan inklusif yakni a) melnelrapkan sistelm manajelmeln belrbasis selkolah dalam hal pelreIncanaan, pelngorganisasian, pelngarahan, pelngoordinasian, pelngawasan dan elvalulasi; b) selkolah selbisa mulngkin melmbanguln kondisi kellas yang ramah, hangat, melnelrima kelanelkaragaman dan pelrbeldaan; c) gulrul yang melmiliki kempelteInsi pelmbellajaran bagi selmula pelselrta didik belrkelbultulhan khulsuls; dan d) gulrul melmiliki kelmampulan dalam melngoptimalkan pelran orang tula, telnaga profelssional, organisasi profelsi, Lelmbaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan komitel selkolah dalam kelgiatan pelreIncanaan, pellaksanaan, dan elvalulasi.

Lelbih melndalam pada pelnyellenggaraan pelndidikan inklusif, telrdapat tahapan-tahapan yang haruls dilakulkan selsulai delngan standar dan proseldulr pada peldoman ulmulm pelndidikan inklusif dalam Pelmelndiknas nomor 70 tahun 2009. Hal paling melndasar pada pelnyellenggaraan pelndidikan inklusif adalah pelselrta didik yang dibagi pada katelgori: 1) pelselrta didik normal dan 2) pelselrta didik belrkelbultulhan khulsuls maka dalam pelnelrimaan pelselrta didik barul belrkelbultulhan khulsuls di SMP Nelgelri 4 sidoarjo tidak ada pelmbelda delngan pelselrta didik relgullelr. Ulntulk pelnelrimaan pelselrta didik barul (PPDB) relgullelr maulpuln belrkelbultulhan khulsuls jelnjang SMP Nelgelri sel Sidoarjo

adalah satu pintu online belkalkulasi untuk pelselrta didik relguler maupuln pelselrta didik belkelbultulhan khulsuls. Hanya belda jalur saja yang diselbult jalur Kelas Khulsuls Celrdas Istimelwa (KKCI). Dan tidak ada syarat khulsulsnya hanya mellampirkan hasil pelmeliksaan dari psikolog ataul dari RSUD. Belrakul julga di SMP Nelgelri 4 Sidoarjo tidak ada syarat khulsuls. Jadi tidak dipelsullit bgi PDBK ulntulk belselkolah di SMP Nelgelri. Hal ini julga melmpelrmulda bagi wali mulrid PDBK ulntulk melngulruli adminitrasi dan PDBK melrasakan kelselmpatan yang sama melndapatkan pelndidikan yang belmultul pada satulan pelndidikan diselmula jelnis.

Lebih lanjut pada tahapan belrikultnya yakni pelmilihan kulrikullulm, kulrikullulm pada satulan pelndidikan pelndidikan inklusif helndaknya dapat melngakomodasi kelbultulhan dan kelmampuan pelselrta didik selsulai potelnsi, kompeltelnsi dan karaktelr pelselrta didik. Kulrikullulm yang ditelrapkan oleh satulan pelnyellelenggara program pelndidikan inklusif SMP Nelgelri 4 Sidoarjo adalah kulrikullulm standar nasional delngan modell modifikasi selrta klasifikasi pelselrta didik ulmulm dan belkelbultulhan khulsuls yang meliliki potelnsi kelcelrdasan relrata dan diatas relrata. Modell modifikasi digulnakan agar dapat diselsulaikan delngan kelmampuan pelselrta didik belkelbultulhan khulsuls. Seldangkan pada kulrikullulm kelkhulsulsan ataul layanan khulsuls pada peldoman ulmulm pelndidikan inklusif tellah dilaksanakan oleh SMP Nelgelri 4 Sidoarjo, belbelrapa diantaranya: a) bina komulnikasi, b) bina diri, c) bina gelrak, d) bina pribadi dan sosial selrta e) bina vokasional ataul kelcakapan hidulp.

Dalam aspelk keltelnagaan dan melnjalankan pelrannya, telnaga pelngajar yang dimiliki SMP Nelgelri 4 Sidoarjo dapat dikatakan tellah melmelnulhi kritelria pada peldoman ulmulm. Telrdapat 69 telnaga pelndidik, delngan klasifikasi 55 orang gulrul dan 14 orang staf selrta karyawan. Dari 55 orang gulrul telrselbult belbelrapa diantaranya telrgabulng kel dalam satulan kelrja tim inklusi delngan 3 orang Gulrul Pelmbimbing Khulsuls (GPK). Para gulrul pelmbimbing di SMP Nelgelri 4 julga melmelnulhi kritelria minimal yaitul lullulsan dari Pelndidikan Lular Biasa (PLB) dan julga Bimbingan Konselling (BK) yang julga masih selrulmpuln. GPK telrselbult seltiap orangnya belrtanggulng jawa pada 1 (satu) rombongan bellajar. Telnaga pelndidik selrta gulrul pelmbimbing melnjalankan pelran selsulai tulpoksi pada peldoman ulmulm pelnyellelenggaraan pelndidikan inklusif delngan selcara belrsinelrgi melnjaln koordinasi dan kolaborasi dalam pelngellolaan kelas dan prosels pelmbellajaran.

Proses pelmbellajaran pelndidikan inklusif tidak hanya dilakulkan di dalam kelas. Telrdapat sulatul rulang yang sangat dominan kelbelradaannya dalam pelnyellelenggaraan pelndidikan inklusif yakni rulang sulmbelr (Relsoulrcels Room). Rulang sulmbelr melrupakan rulangan yang belrfulngsi ulntulk melnopang prosels pelmbellajaran pelselrta didik dalam melngimplelmeIntasikan kulrikullulm kelkhulsulsan ataul belrkelnaan delngan potelnsi non akadelmik (bina komulnikasi, bina diri, bina gelrak, bina pribadi dan sosial, selrta bina vokasional). Rulang sulmbelr julga dilelengkapi fasilitas pelndulkulng belrulpa meldia pelmbellajaran selpelrti pelralatan mellulkis, batik, melsin jahit, organ tulnggal, celrmin belsar, krulk (walkelr) dan masih banyak lagi.

Dalam manajelmeln infrastrukltur sarana dan prasarana pihak SMP Nelgelri 4 Sidoarjo tellah melngulpayakan pelngadaan meldia dan alat pelnuljang bagi anak belkelbultulhan khulsuls delngan selbaik mulngkin. Namuln dalam pelmbangulnan

infrastruktur SMP Negeri 4 Sidoarjo mengalami beberapa hambatan. Hambatan utama pembangunan infrastruktur bangunan pendidikan adalah kurangnya dana dari pemerintah, pasalnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah harus terbagi dengan kebutuhan sekolah yang lain seperti pengadaan serta perawatan media dan alat pembelajaran yang lain. Ditinjau dari perspektif teori keadilan hak asasi manusia oleh John Rawls bahwa pemenuhan hak peserta didik penyandang disabilitas dalam layanan pendidikan pada pelaksanaan program pendidikan inklusif telah memenuhi unsur kesamaan kesempatan dan tanpa diskriminasi. Namun dalam melengkapi komponen-komponen pendidikan seperti infrastruktur bangunan dalam penyelenggaraan program masih perlu evaluasi dan perbaikan.

Terkait temuan data hasil dari wawancara dan observasi menemukan bahwa terkait PPDB Berkesetaraan Khusus, sarana dan prasarana, dan tenaga pengajar serta proses pembelajaran sudah sesuai dengan aktualisasi nilai keadilan dalam pemenuhan hak-hak peserta didik penyandang disabilitas yang ada di SMP Negeri 4 Sidoarjo. Dan adanya beberapa wali murid yang menggunakan jasa shadow teacher tidak merusak nilai keadilan yang dirasakan oleh siswa inklusi dan orang tua yang tidak menggunakan. Karena sesama wali murid saling membantu, menghargai dan mengerti.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa negara telah berupaya untuk memenuhi hak peserta didik dalam hal ini adalah penyandang disabilitas. Pemenuhan hak peserta didik yang diupayakan pemerintah dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif sesuai Permendiknas No. 70 tahun 2009 pada sekolah inklusi yang melibatkan satuan pendidikan tingkat dasar hingga tingkat menengah atas. Akibat dari terbitnya Permendiknas tersebut membuat pemerintah daerah berusaha mengakomodir penyelenggaraan pendidikan inklusif khususnya bagi peserta didik berkesetaraan khusus terutama di Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Sidoarjo sebagai salah satu pelaksana peraturan Menteri tersebut mulai dari dasar hukum, administrasi, sarana prasarana, kurikulum, serta evaluasi dalam kegiatan belajar mengajar.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pemerataan dan peningkatan mutu, keberagaman, keberlanjutan, dan keterlibatan seluruh komponen dengan mengoptimalkan layanan pada poin-poin implikasi manajerial. Fasilitas yang didapat peserta didik berkesetaraan khusus sama dengan peserta didik normal pada umumnya, karena pelajaran yang dilakukan pada peserta didik berkesetaraan khusus berada di kelas reguler bersama peserta didik normal yang lain. Hanya saja pada infrastruktur sarana prasarana serta kurikulum harus mendapat penambahan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik berkesetaraan khusus yang sebelumnya telah melakukan tindakan identifikasi dan asesmen. Sinergi antara seluruh komponen mulai dari pemerintah, pihak sekolah dan tim inklusi, tenaga profesional, serta orang tua harus terus berjalan karena koordinasi dari semula komponen tersebut menjangkau proses keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Pelmasalahan pada penyelenggaraan pendidikan inklusif pada sekolah inklusi di SMP Negeri 4 Sidoarjo hampir dapat teratasi, namun terdapat beberapa hambatan yang memerlukan imbas pada komponen lain yakni dana operasional dari pemerintah yang berimbas pada pengadaan infrastruktur penunjang bagi siswa berkebutuhan khusus. Hal tersebut selanjutnya masih dapat teratasi oleh pihak sekolah dengan adanya sumbangan sukarela yang diminta dari para wali murid.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John W. 2013. *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Badan Pusat Statistik [BPS]. 2019. *Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Timur 2019*: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.
- Darma, Indah Permata., dan Binahayati Rusyidi. 2015. Pelaksanaan Sekolah Inklusi di Indonesia. *Jurnal Prosiding Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 2(2): 223-227.
- Davidson, Scott. 1994. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta : Pustaka Utama Grafit
- Departemen Pendidikan Indonesia. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- <http://kabarsidoarjo.com/?p=21600> diakses pada tanggal 6 Maret 2023.
- <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/02/12581141/komnas-ham-catat-4-kondisi-darurat-pendidikan-indonesia> diakses pada tanggal 6 Maret 2023
- <https://www.bangsaonline.com> diakses pada tanggal 6 Maret 2023.
- Hulijbels, Thelo. 1995. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta : Kanisius.
- Ikmal, Heli. 2015. Pendidikan Humanis: Telaah Perbandingan Ki Hajar Dewantara dan Paulo Freire. *Jurnal Akademika*. 9(1):137-154.
- Ismail, Basuki. 1993. *Negara Hukum. Demokrasi Transisi* . Intermedia : Jakarta.
- Isra, Saldi. 2014. *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pengaturan Hak asasi manusia di Indonesia*. *Jurnal konstitusi*. 11(3):409-427.
- Kasim, Irfal. 2001. *Hak Sipil dan Politik, Elit- Elit Pilihan*. Bantul I. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). Jakarta.
- Kinasih, Arum Sukma. 2010. *Pelatihan Mindfulness Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Psikologis Pada Remaja Difabel Fisik*. *Jurnal Intervensi Psikologi*. 3(1).
- Lestari, Elta Yulni, Slamet Sularto, dan Noorochmat Isdaryanto. 2017. *Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention on The Rights of Persons With Disabilities (Cprd) Dalam Bidang Pendidikan*. *Jurnal Intelgristik*. 28(1):1-9.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung :Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Johan. 2011. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung : Mandar Maju.
- Nawawi, Hadari. 1990. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Nisa, Latifa Sulhada. 2019. *Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas di Kalimantan Selatan*. *Jurnal Kebijakan Pembangunan* 14(1):47-55.

- Pelratulran Melntelri Pelndidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 telntang Pelndidikan Inklusif Bagi Pelselrta Didik yang Melmiliki Kellainan dan Melmiliki Potelnsi Kelcelrdasan dan/ataul Bakat Istimelwa.
- Pratama, Ridho Arya. 2019. Pellaksanaan Pelayanan dan Pelmelnulhan Hak-hak Pelnyandang Disabilitas dalam Bidang Pelndidikan di Kota Bandar Lampulng. Skripsi. Tidak ditelrbitkan. Fakultas Hulkulm. Ulnivelrsitas Lampulng: Bandar Lampulng.
- Rawls, John. 2011. Telori Keladilan, Telrjelmahan Ulzir Faulzan dan Helrul Prasetyo. Yogyakarta : Pulstaka Bellajar.
- Ruldiati, Sari. 2011. Potrelt Selkolah Inklusif di Indonelsia. Makalah Pelrtelmulan Nasional Asosiasi Kelselhatan dan Relmaja (AKEISWARI): Yogyakarta, Tahun 2011.
- Seltiawan, A. D. dan Rr. Nanik Seltiyowati. 2020. Pelmelnulhan Hak Pelselrta Didik Pelnyandang Disabilitas di SMA Nelgelri 4 Sidoarjo (Stuldi Aksels Pelndidikan Program Selkolah Inklusi). Julrnal Kajian Moral dan Kelwarganelgaraan. 8(2):337-351.
- Sullistyadi, H Kulrnia. 2014. ImplelmeIntasi Kelbijakan Pelnyellelnggaraan Layanan Pelndidikan Inklusif di KabulpateIn Sidoarjo. Julrnal Kelbijakan dan Manajelmeln Pulblik. 2(1).
- Sulparlan, Helnriculs. 2014. Filsafat Pelndidikan Ki Hajar Delwantara dan Sulmbangannya bagi Pelndidikan Indonelsia. Julrnal Filsafat 25(1):56-74.
- Tarnoto, Nisa. 2016. Pelrmasalahan-Pelrmasalahan yang Dihadapi Selkolah Pelnyellelnggara Pelndidikan Inklusi pada Tingkat SD. Julrnal Psikologi Indonelsia 13(1):50-61.
- Triyanto, T. dan Pelrmatasari D. R. 2017. Pelmelnulhan Hak Anak Belrkelbultulhan Khulsuls Di Selkolah Inklusi. Julrnal Selkolah Dasar: Kajian Telori dan Praktik Pelndidikan. 8(2):223-227.
- UIndang-UIndang Nomor 39 Tahun 1999 telntang Hak Asasi Manulsia
- UIndang-UIndang Nomor 20 Tahun 2003 telntang Sistelm Pelndidikan Nasional
- UIndang-UIndang Nomor 8 Tahun 2016 telntang Pelnyandang Disabilitas
- Yasin, Johan. Hak Asasi Manulsia dan Hak Selrta Kelwajiban Warga Nelgara dalam Hulkulm Positif Indonelsia, 2009, Julrnal Syiar
- Wiluljelng, Sri Rahayul. 2013. Hak Asasi Manulsia: Tinjaulan Dari Aspelk Historis dan Yulridis. Julrnal Hulmanika. 18(2).